

## GEREJA DAN NEGARA ANALISIS KRITIS KETERLIBATAN GEREJA DALAM POLITIK AKTIF DI INDONESIA

Immanuel Adhi Siswanto Wisnu Nugroho<sup>1</sup>, Hery Budi Yosef<sup>2</sup>, Dicky Kansil<sup>3</sup>  
[coach.immanueladhi@gmail.com](mailto:coach.immanueladhi@gmail.com)<sup>1</sup>, [herybudiyosef@gmail.com](mailto:herybudiyosef@gmail.com)<sup>2</sup>, [dickykansil@gmail.com](mailto:dickykansil@gmail.com)<sup>3</sup>  
STT Global Glow Indonesia

### ABSTRAK

Analisa ini mengeksplorasi keterlibatan gereja dalam politik aktif di Indonesia, yang dimulai dengan menganalisis peran serta gereja terhadap dinamika hubungan antara institusi keagamaan dan Negara. Dengan pertimbangan sejarah, konteks social, dan dampak kebijakan public, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tantangan dan peluang yang dihadapi gereja. Fokus utama adalah bagaimana keterlibatan ini mempengaruhi masyarakat, identitas religious, dan keberlanjutan demokrasi. Temuan menunjukkan bahwa keterlibatan gereja dapat menjadi kekuatan positif maupun negative, tergantung pada konteks yang diusung. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi untuk penyimpangan politik, keterlibatan gereja yang konstruktif dapat memperkuat demokrasi partisipasi masyarakat dalam proses politik.

**Kata Kunci:** Gereja, Politik dan Negara.

### ABSTRACT

*This analysis explores the church's involvement in active politics in Indonesia, which begins by analyzing the church's participation in the dynamics of the relationship between religious institutions and the State. Taking into account history, social context, and the impact of public policy, this study aims to evaluate the challenges and opportunities facing the church. The main focus is on how this engagement affects society, religious identity, and the sustainability of democracy. The findings show that church involvement can be a positive or negative force, depending on the context in which it is carried. The results of the analysis show that although there is potential for political aberration, constructive church involvement can strengthen the democracy of community participation in the political process.*

**Keywords:** Church, Politics and State.

### PENDAHULUAN

Hubungan antara gereja dan negara merupakan dinamika yang kompleks dan terus berkembang sepanjang sejarah. Di Indonesia, keterlibatan gereja dalam ranah politik telah menjadi isu yang menarik untuk dikaji, terutama pasca reformasi. Di satu sisi, gereja memiliki mandat moral untuk terlibat dalam isu-isu sosial dan politik yang berdampak pada kehidupan umat manusia. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan antara misi gereja dan kepentingan politik. Kitab Matius 22:21 yang menyatakan, "Karena itu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah," sering kali menjadi rujukan dalam membahas keterlibatan gereja dalam politik. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara kewajiban warga negara dan kewajiban sebagai umat beragama.

Serta dalam perspektik iman Kristen gereja dan negara merupakan dua entitas yang terkait satu dengan yang lainnya. Hubungan keduanya ditentukan oleh sejarah gereja dan pemikiran tokoh gereja yang mengemuka pada masa tertentu. Konteks Abad Pertengahan menjadi lokus berkecambahnya hubungan gereja dan negara. Pemikir-pemikir yang mengemuka dalam padangan pemikiran Agustinus Thomas Aquinas (1225-1274) mendasari pemikirannya pada hukum alam. Ia berpendapat bahwa

eksistensi negara bersumber dari sifat alamiah manusia. Salah satu sifat manusia adalah wataknya yang bersifat sosial dan politis. Menurut Aquinas, manusia adalah makhluk sosial dan makhluk politik (*man is a social and political animal*) sebagaimana dikemukakan Agus Dedy dalam sebuah jurnal.<sup>1</sup> Reformasi Gereja yang disponsori Luther pada masa itu saat Krisis semakin besar dan melahirkan ketegangan bahkan konflik. Gereja dan negara saling mengklaim diri dalam memegang pengaruh dan kuasa. Situasi ini makin tajam dan menukik pada peristiwa reformasi. Sehingga menjadi puncak dampak intensnya hubungan gereja dan negara. Zending yang datang ke Indonesia pada umumnya dipengaruhi oleh aliran Calvinis.<sup>2</sup> Jadi, pandangan pandangan ini yang mempengaruhi akan keberadaan gereja dalam Analisis Kritis Keterlibatan Gereja dalam Politik Aktif di Indonesia. Dan kehadiran gereja dalam sistim Negara itu sangat penting sebab keberadaan gereja akan memberikan kontribusi besar untuk kemajuan Negara.

## METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan paradigma naturalistik, dimana mendasarkan pada fenomena yang terjadi. Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan literatur-literatur yang ada atau studi pustaka. Pustaka yang dipakai oleh penulis antara lain Alkitab, buku-buku serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Penulis juga menggunakan metode eksegesis untuk menggali data yang ada dalam Alkitab untuk menemukan salah satu isu-isu kontemporer berkaitan Gereja dan Negara: Analisis Kritis Keterlibatan Gereja dalam Politik Aktif di Indonesi. Data yang sudah terkumpul akan disusun dalam bentuk deskriptif. Kualitatif dan deskriptif menurut Sonny adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu penelitian. (Zaluchu, 2021) Secara sistematis dalam pembahasan, penulis akan memaparkan tentang pengertian Gereja dan Negara: Analisis Kritis Keterlibatan Gereja dalam Politik Aktif di Indonesi masa kini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Politik

Kata politik berasal dari bahasanya Yunani yakni “*polis*” yang memiliki arti kota atau suatu komunitas. Istilah lain dalam bahasa Yunani ialah “*politeia*” yang berarti warga. Jadi politik pada mulanya berarti suatu masyarakat yang berdiam di suatu kota.<sup>3</sup> Dalam mendefenisikan mengenai politik Oscar Cullman, yang dikutip oleh Gunche Lugo, membedakan antara politeia dan politeuma. *Politeia* memiliki definisi politik dalam artian merebut kekuasaan atau kedudukan dalam pemerintahan. Dan sedangkan *politeuma* adalah politik yang menekankan tegaknya nilai-nilai kerajaan Allah di dunia ini contohnya: keadilan, kebenaran, kesejahteraan dan mewujudkan peradaban baru yang mengangkat harkat, martabat manusia sebagai gamar serta rupa Allah (Kej. 1:26-28)<sup>4</sup>.

Dalam perkembangan teori politik modern, politik diasumsikan sebagai

---

<sup>1</sup> Agus Dedy, “*Analisis Pemikiran Filsafat Thomas Aquinos*” dalam <https://www.ejournal.unigal.ac.id> (diakses, 8 Maret, 2024).

<sup>2</sup> J.S. Arironang, *Berbagai Aliran di Dalam dan di Sekitar Gereja*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia: 2007), 52.

<sup>3</sup> Martin L. Sinaga (peny), *Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia*, Teks-Teks Terpilih Eka Darmaputra, (Jakarta: BPK Gunung Mulia), 409.

<sup>4</sup> Gunche Lugo, *Manifesto Politik Yesus*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2009), 42.

kekuasaan Negara, yang diwakili oleh partai-partai politik untuk mewakili aspirasi masyarakat atau rakyat, khususnya dalam konteks Negara demokrasi. Dengan demikian dalam konteks Negara demokrasi, politik didefinisikan sebagai kekuasaan untuk menduduki parlemen atau pemerintahan, sehingga dengan demikian politik identik dengan kekuasaan.<sup>5</sup> Antara abad keenam belas sampai awal abad kedua puluh, *politik* diartikan lebih sempit dibandingkan dengan pengertian yang dipahami orang-orang Yunani. *Jean Bodin* (1530-1596), seorang filosof politik Prancis, memperkenalkan istilah “ilmu politik” (*science politique*). Defenisi tentang politik, juga diungkapkan oleh *Montesquieu* (1687-1755) yang mengemukakan pendapatnya bahwa semua fungsi pemerintahan dapat dimasukkan ke dalam kategori legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

### **Pengertian Gereja**

Kata “Gereja” bersal dari “*igreja*” dari bahasa Portugis, yang diambil dari bahasa Yunani “*ekklesia*”, yang berarti “orang-orang yang terpenggil keluar atau suatu perhimpunan orang-orang” (Kisah Para Rasul 19:39; 7:38; Ibrani 2:12). “*Ekklesia*” muncul 114 kali di PB, tiga kali di Injil, dan 111 kali di surat-surat. Namun demikian kebanyakan kata itu digunakan dalam pengertian teknis yang ditunjukkan dalam gereja Perjanjian Baru, yaitu sekelompok orang percaya yang dipanggil dalam Yesus Kristus.<sup>6</sup>

Gereja dapat didefinisikan sebagai sebuah persekutuan yang diberi spesifikasi dan konotasi khusus, yaitu sebagai persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil, dipilih dan dikuduskan untuk menjadi berkat bagi semua orang atau sesama manusia (Kejadian 12:2-3; Kel. 19:5-6; Ul. 4:20; Titus 2:14; 1 Petrus 2:9, 14).<sup>7</sup> Dari segi etimologis dan teologis gereja primer adalah persekutuan orang percaya secara rutin berkumpul untuk beribadah secara khusus sebagai jemaat ditempat permanen yang diberi nama gereja.<sup>8</sup>

Dalam arti yang sederhana gereja adalah umat Allah, yaitu orang yang telah dipanggil keluar dari dunia dengan jalan Injil Kristus. Orang-orang percaya ini memelihara suatu hubungan pribadi dengan Kristus oleh iman dan dipersatukan dalam kelompok orang percaya oleh Roh Kudus (1 Korintus 12:12-13).<sup>9</sup> Alkitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, menyaksikan dengan jelas tentang fatwa pemilikan Allah dasar utama dari berdirinya gereja. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipilih Allah, diselamatkan dan dipersiapkan Allah untuk menjadi teman-teman sekerja-Nya dan mengerjakan misi Allah di muka bumi ini.<sup>10</sup> Jadi, gereja adalah persekutuan di dalam Kristus.

### **Pandangan Tentang Politik Dan Alkitab**

Dalam memahami politik serta pemahaman tentang gereja, maka penulis akan memaparkan pandangan Alkitab tentang Politik. Istilah politik memang tidak dijumpai secara tersurat dalam Alkitab. Namun perlu untuk disadari bahwa di dalam Alkitab tersirat hal-hal penting tentang bagaimana Umat Allah atau Gereja hadir di tengah-tengah masyarakat dan menata kehidupan bersama dan kehidupan bersama-sama. Dalam prinsip etika politik Alkitabiah, suatu pemerintahan yang baik memang terfokus dalam ketiga urusan ini: penegakan hukum yang tidak berat sebelah, keadilan bagi orang miskin, dan pembebasan warga dari penindasan dan kekerasan. Syair mazmur-

---

<sup>5</sup> Gunche Lugo, op.cit, hlm. 42

<sup>6</sup> Paul Enns, *The Moody Handbook Of Theology* (Malang: Literatur SAAT, 2006), 431.

<sup>7</sup> Sularso Sopater, *Kepemimpinan dan Pembinaan Warga Gereja* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), 60.

<sup>8</sup> Ibid., 61.

<sup>9</sup> Jesse Miranda, *Gereja Kristen dan Pelayanan* (Malang: Gandum Mas, 1986), 54.

<sup>10</sup> Yakub B. Susabda, *Prinsip-prinsip Pertimbangan Utama dalam Administrasi Gereja* (Malang: Gandum Mas, 2006), 24.

mazmur yang terkait dengan peran kekuasaan berulang-ulang mengungkapkan pemerintahan ideal adalah yang menyahuti seruan orang berkekurangan, yang peduli orang miskin, dan yang menentang kekerasan melainkan mengupayakan damai. Di balik etika itu terdapat pengakuan bahwa para penguasa yang memihak pada pemulihan kaum yang lemah, miskin dan tertindas adalah “wakil” Allah.

Jadi, dapat dikatakan bahwa dalam Perjanjian Lama yang menentukan sistem perpolitikan, khususnya di kalangan bangsa Israel dalam menata kehidupan bersama adalah ketaatan kepada Allah yang ditandai dengan berlakunya hukum Taurat dan keadilan. Bagian lain yang penting dalam Perjanjian Baru, yang memiliki latar belakang pada suasana politik kerajaan Romawi adalah surat Wahyu yakni Wahyu 13. Dari sini ditekankan bahwa pemerintah yang memutlakkan dirinya dan menganggap dirinya mahakuasa, maka dia bagaikan binatang buas. Pemerintah yang demikian adalah seteru Allah dan bukan hamba Allah. Tema yang sama dikemukakan oleh Yesus pada saat berada di hadapan Pilatus bahwa: “engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap Aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas” (Yoh 19:4). Demikian juga Petrus mengatakan bahwa “tunduklah, karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutus-Nya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik” (I Petrus 2:13,14). Dengan demikian Pemerintah tidak memiliki kuasa mutlak, oleh karena itu harus dikritik dan dikoreksi jika tidak menjalankan tugasnya sebagai “hamba Allah”

### **Hubungan Gereja Dan Negara**

Hubungan gereja dan negara adalah kompleks dan dinamis. Keduanya memiliki peran yang saling mempengaruhi dalam membentuk masyarakat. Dengan saling menghormati dan berkomunikasi, gereja dan negara dapat berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan memperkuat nilai-nilai demokrasi.

Hubungan antara gereja dan negara merupakan aspek penting dalam kehidupan sosial dan politik, terutama di negara yang memiliki keberagaman agama. Hubungan antara Gereja dan Negara merupakan persoalan yang menjadi perdebatan dalam sejarah partisipasi Gereja dalam politik, bahkan menurut Andreas A. Yewangoe hubungan antara Gereja dan Negara bukanlah sesuatu yang gampang untuk dirumuskan. Sejarah sudah memperlihatkan kepada kita, bahwa, bukan tidak jarang perlombaan untuk saling mendominasi satu terhadap yang lainnya. Menurut Donald Jay Losher, secara umum pandangan mengenai hubungan antara Gereja dan Negara dibagi menjadi tiga kategori yaitu pemisahan ketat, asimilasi dan interaksi. Pemisahan ketat tidak bisa berbuat apaapa terhadap Negara, karena kaum kristen memilih sendiri untuk tidak berperan di bidang politik atau sosial. Asimilasi juga tidak mampu karena kaum beragama telah dikuasai oleh pemerintah dan ideologinya, sehingga hanya mampu menerima segala kebijakan secara pasif. Baik asimilasi maupun pemisahan ketat tidak mampu memegang peranan aktif dalam perubahan sosial dan politik. Sikap interaksilah yang mampu bertahan lama dalam periode kontemporer, karena transformasi dan 16. Weinata Sairin dan J.M. Pattiasina, Hubungan Gereja dan Negara dan Hak-Hak Asasi Manusia, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996, Hlm. 23 14 pembebasan memegang peranan jauh lebih aktif dan positif, meskipun juga dengan resiko yang lebih besar namun memegang peranan paling aktif, kritikal dan positif terhadap Negara dan masyarakat.<sup>11</sup>

Zakaria J. Ngelow yang membaginya ke dalam 5 model yakni: kesatuan Gereja

---

<sup>11</sup> Weinata Sairin dan J.M. Pattiasina, *Hubungan Gereja dan Negara dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), 23

dengan Negara, yang memberi Gereja kuasa atas Negara. Yang disebut ecclesiocracy; kesatuan Gereja dengan National confessionalism Negara, yang memberi Negara kuasa atas Gereja. Yang disebut erastianism; suatu kesatuan denominasi gereja tertentu dengan Negara. Yang disebut sebagai The Establishment Principle; suatu pengakuan resmi atas otoritas pemerintahan Yesus Kristus dan Firman-Nya oleh Negara. 17 Menurut Calvin sebagaimana yang dikutip oleh Andreas A. Yewangoe, mengenai hal tersebut bahwa hubungan Gereja dengan Negara merupakan dua lingkaran yang pusatnya adalah Yesus Kristus. Jadi baik negara maupun gereja berpusatkan satu pusat saja yaitu Yesus Kristus. Dengan kata-kata lain, baik pelayanan gereja maupun pelayanan negara bersumber dari sumber yang satu yaitu Yesus Kristus. Hanya memang lingkup pelayanan mereka berbeda. Yang satu mungkin lebih terbatas, sedangkan yang lainnya lebih "luas". Marthin Luther pada pihak lain berbicara mengenai dua kerajaan yang terpisah, namun terdapat juga titik-titik singgung di antara keduanya. Bagaimana menempatkan secara persis titik-titik singgung itu, tentu dibutuhkan pemahaman mendalam dan kepekaan luar biasa menyiasati apa yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>12</sup>

### **Tujuan keterlibatan gereja dan politik**

Keterlibatan gereja dalam politik memiliki beberapa tujuan.

1. Tujuan Pelayanan : Politik penuh dengan kecenderungan destruktif atau bersifat merusak yang kemudian melahirkan penindasan dan belenggu bagi banyak orang. Oleh sebab itu gereja terpanggil untuk ikut serta dalam usaha pelayanan atau pembebasan yang dilakukan Allah (Luk. 4; Mat. 25). Gereja perlu melayani mereka yang menjadi korban permainan politik, gereja harus mewujudkan kebebasan dan hak-hak asasi manusia dalam segala lapangan kehidupan: agama, pendidikan, pekerjaan dan lain – lain.<sup>13</sup>
2. Tujuan Missioner : Gereja perlu berbicara dan bersaksi tentang kebaikan Allah bagi semua manusia.<sup>14</sup>
3. Tujuan Korektif : Melakukan koreksi terhadap dosa para pemimpin politik. Koreksi dapat diartikan sebagai pelayanan pastoral. Gereja harus menimbulkan kesadaran akan kasih Allah bagi mereka yang ingin berubah dan menyesali kesalahannya.<sup>15</sup>
4. Tujuan Normative : Gereja harus menegakkan kebenaran di tengah kehidupan politik, yaitu menegakkan keadilan dan mewujudkan kasih. Maka kekuasaan politik harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan cinta kasih dengan kata lain, tujuan keterlibatan gereja dalam politik agar manusia lebih taat kepada Allah, dari pada manusia.<sup>16</sup>
5. Tujuan Edukatif : Gereja harus mendidik warga gereja supaya peduli dan paham mengenai tugas panggilannya di dunia. Ketertibatan dalam politik sekaligus berfungsi sebagai pendidik politik bagi warga gereja.<sup>17</sup>

### **Keterlibatan Gereja Dalam Politik Di Indonesia**

Dalam pemahaman sebuah tinjauan historis dalam sejarah Indonesia sebagai berikut:

#### **Masa Kolonial**

Pada masa kolonial, gereja hanya berfokus pada 3G(Gold ( Mencarai kekuasaan,

<sup>12</sup> Zakaria J. Ngelow, *Pengalaman Kristen dalam hubungan agama dan Negara, Pointers pada seminar Gereja, Negara dan Isu-Isu Agama*, download, 15 Juli 2024.

<sup>13</sup> Andreas A. Yewangoe, *Agama dan Negara: Sebuah Hubungan Yang Tidak mudah*, Disampaikan Dalam Kursus "Pendidikan Politik Angkatan III" di Palangka Raya, 20 Oktober 2008.

<sup>14</sup> Robert P. Borong, *Etika Politik Kristen serba-serbi Politik Praktis* (Jakarta: Unit Publikasi dan Informasi dan Pusat Studi Etika), 5.

<sup>15</sup> Ibid., 5

<sup>16</sup> Ibid., 5

<sup>17</sup> Ibid., 5

Glory (memperluas wilayah demi kejayaan) dan Gospel (menyebarkan agama).<sup>18</sup> gereja-gereja di Indonesia memiliki peran yang kompleks. Gereja yang terutama berasal dari misi Eropa, awalnya berfokus hanya pada penginjilan dan pendidikan. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran nasional, gereja mulai berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Serta ada beberapa tokoh gereja terlibat dalam organisasi pergerakan nasional dan membantu mendidik masyarakat tentang hak dan kebebasan. Dan selain itu, gereja juga berfungsi sebagai tempat perlindungan dan dukungan bagi para pejuang kemerdekaan saat itu, meskipun kadang terjebak dalam kebijakan kolonial yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan.

### **Masa Orde Baru**

Pada masa Orde Baru, pemerintahan Soeharto menerapkan kebijakan yang mengatur keberadaan agama dan organisasi keagamaan, termasuk gereja<sup>19</sup>. Surat Keputusan Bersama (SKB) tahun 1969 tentang Pendirian Rumah Ibadah. Kebijakan ini münduk agar tidak adanya konflik kehadiran Negara dalam gereja. Pemerintah berusaha untuk meminimalkan peran politik gereja dan menekankan stabilitas nasional. Meskipun demikian, gereja tetap berfungsi sebagai ruang pembinaan iman dan bagi advokasi sosial dan kemanusiaan. Beberapa pemimpin gereja mulai mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak adil, meskipun mereka harus beroperasi dengan hati-hati untuk menghindari penindasan. Kebijakan kontrol pemerintah terhadap organisasi keagamaan mengakibatkan berbagai dinamika, termasuk pembentukan kelompok-kelompok gereja yang lebih berani dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.

### **Masa Reformasi**

Reformasi 1998, menjadi titik balik dalam keterlibatan gereja dalam politik Indonesia. Setelah jatuhnya Orde Baru, ruang demokrasi yang lebih luas dan terbuka, dan gereja mulai lebih aktif dalam berbagai aspek kehidupan politik. Gereja terlibat dalam proses demokratisasi, mengadvokasi hak asasi manusia, dan mempromosikan keadilan sosial.<sup>20</sup> Forum-forum dialog antaragama juga semakin berkembang, membantu meredakan ketegangan antar kelompok. Dalam konteks ini, gereja tidak hanya berfungsi sebagai entitas spiritual, tetapi juga sebagai aktor penting dalam membangun masyarakat sipil yang kuat dan partisipatif. Gereja mulai mendukung reformasi politik dan sosial, serta berperan dalam pemilihan umum dan kebijakan publik.

### **Bentuk-bentuk Keterlibatan Gereja Dalam Politik Kontemporer**

1. **Partisipasi Politik**, anggota gereja sering kali terlibat dalam partai politik, baik sebagai anggota, pengurus maupun calon legislative. Gereja memberikan latihan kepada para calon yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan umum, memberikan pelatihan, dan platform untuk berbagi visi. Keterlibatan tersebut sangat membantu memperkuat dalam representasi suara gereja dalam kebijakan publik.
2. **Advokasi**, gereja terlibat dalam advokasi dengan mengeluarkan pernyataan resmi, mengorganisir kampanye, dan berkolaborasi dengan LSM untuk mengangai isu-isu seperti keadilan social, perlindungan hak asasi manusia, dan lingkungan hidup.
3. **Dialog Antar Agama**, gereja aktif membangun dialog komunitas agama lain untuk menciptakan kerukunan dan kolaborasi dalam konteks politik. Untuk membahas dan mengkomunikasikan isu-isu yang mempengaruhi masyarakat, serti toleransi,

---

<sup>18</sup> Kec. Baguala. Kota Ambon and Provinsi Maluku “KENOSIS: JURNAL KAJIAN THEOLOGIA” ISSN 2460-6901 No 1: 170-122.

<sup>19</sup> Syamsuddin Haris, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru* (Jakarta, Yayasan Obor, 1999)

<sup>20</sup> J. Soedjati Dwiwondo. *Gereja dan Politik: dari orde baru hingga reformasi*. (Yogyakarta: Kanisius, 2023)

perdamaian dan keadilan. Dengan hal tersebut mengurangi ketegangan sama dalam advokasi isu-isu public yang relevan.

4. **Pendidikan Politik**, gereja menyelenggarakan pendidikan politik melalui berbagai program serta strategi seperti sekolah non formal yaitu: seminar kebangsaan, lokakarya, dan diskusi kelompok. Mengajarkan berbagai cara pentingnya dalam berpartisipasi dalam pemilu, cara memahami isu politik dan dampak politik. Serta dampak kebijaksanaan publik terhadap masyarakat. Dengan cara tersebut, gereja berperan dalam menciptakan pemilih yang terinformasi dan sadar akan tanggung jawabnya.

## **Motivasi Dan Tantangan Keterlibatan Gereja Dalam Politik**

### **Motivasi**

Keterlibatan gereja dalam politik sering kali didorong oleh kombinasi nilai-nilai agama dan kepentingan politik. Beberapa motivasi utama meliputi:

1. **Nilai-nilai Agama**: Gereja merasa terpanggil untuk menerapkan ajaran moral dan etika dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam kebijakan publik. Banyak ajaran agama menekankan keadilan, kasih, dan perlindungan terhadap yang lemah, mendorong gereja untuk terlibat dalam advokasi isu-isu sosial.
2. **Keperluan Politik**: Gereja juga terlibat dalam politik untuk memastikan bahwa suara komunitasnya terdengar dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan ini dapat membantu memperjuangkan hak dan kepentingan jemaat serta masyarakat yang lebih luas.
3. **Respons terhadap Isu Sosial**: Ketika isu-isu sosial muncul, seperti kemiskinan, ketidakadilan, atau diskriminasi, gereja sering merasa terdorong untuk mengambil tindakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

### **Tantangan**

Gereja menghadapi berbagai tantangan dalam Keterlibatannya dalam politik, antara lain:

1. **Polarisasi Politik**: Keterlibatan gereja dalam politik dapat memperburuk polarisasi di masyarakat. Ketika gereja mengambil posisi politik tertentu, ini bisa menyebabkan perpecahan di antara jemaat dan mengalienasi kelompok lain.
2. **Tekanan dari Kelompok Tertentu**: Gereja sering kali menghadapi tekanan dari kelompok politik atau masyarakat yang memiliki pandangan berbeda. Tekanan ini bisa berupa ancaman, intimidasi, atau diskriminasi terhadap anggota gereja yang berani bersuara.
3. **Konflik Internal**: Keterlibatan politik bisa memicu konflik internal dalam gereja, terutama jika ada perbedaan pendapat di antara anggota tentang isu-isu politik. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dan perpecahan dalam komunitas.
4. **Risiko Kehilangan Kredibilitas**: Jika gereja terlalu terlibat dalam politik praktis atau terlibat dalam skandal politik, ada risiko penurunan kredibilitas di mata jemaat dan masyarakat umum. Ini dapat mengurangi pengaruh gereja dalam isu-isu sosial dan spiritual. Jadi, Menghadapi tantangan ini, gereja perlu menavigasi dengan hati-hati untuk memastikan bahwa keterlibatannya dalam politik tetap sejalan dengan nilai-nilai inti ajarannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

### **Dampak Keterlibatan Gereja Dalam Politik**

Keterlibatan gereja dalam politik bisa membawa berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Berikut adalah beberapa di antaranya:

### **Dampak Positif**

1. **Peningkatan Kesadaran Politik:** Gereja dapat berperan sebagai penggerak untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan jemaatnya. Melalui khotbah dan diskusi, isu-isu politik dapat disampaikan dengan cara yang mudah dipahami.
2. **Penguatan Masyarakat Sipil:** Keterlibatan gereja dalam isu-isu sosial dan politik dapat memperkuat masyarakat sipil. Gereja sering kali menjadi wadah untuk mobilisasi masyarakat dalam berbagai aktivitas, seperti pemungutan suara, kampanye kesadaran, dan dialog sosial.
3. **Penyelesaian Konflik:** Gereja sering kali berfungsi sebagai mediator dalam konflik sosial atau politik. Dengan nilai-nilai yang mengedepankan perdamaian dan rekonsiliasi, gereja dapat membantu meredakan ketegangan dan mencari solusi yang konstruktif.
4. **Advokasi Keadilan Sosial:** Gereja dapat menjadi suara bagi kelompok yang terpinggirkan, memperjuangkan keadilan sosial dan hak asasi manusia, serta memberikan dukungan kepada kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

### **Dampak Negatif**

1. **Polarisasi Agama:** Keterlibatan gereja dalam politik dapat menyebabkan polarisasi di antara komunitas agama. Ketika gereja berpihak pada satu kelompok politik tertentu, bisa memicu ketegangan antaragama dan di dalam masyarakat yang lebih luas.
2. **Instrumentalisasi Agama untuk Kepentingan Politik:** Ada risiko bahwa agama digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik, di mana nilai-nilai spiritual dapat terdistorsi demi keuntungan politik. Hal ini dapat merusak integritas pesan agama itu sendiri.
3. **Penurunan Kredibilitas Gereja:** Jika gereja terlalu terlibat dalam politik atau terlibat dalam skandal politik, kredibilitasnya di mata jemaat dan masyarakat umum dapat menurun. Ini bisa mengurangi pengaruh gereja dalam bidang sosial dan spiritual.
4. **Konflik Kepentingan:** Keterlibatan dalam politik dapat menyebabkan konflik kepentingan, di mana pemimpin gereja mungkin terjebak dalam keputusan yang tidak sejalan dengan ajaran moral dan etika agama mereka.

### **KESIMPULAN**

Keterlibatan gereja dalam politik di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks, mencerminkan interaksi antara nilai-nilai agama dan realitas sosial-politik yang ada. Peran Positif: Gereja telah berfungsi sebagai agen perubahan, mendorong keadilan sosial, dan melindungi hak asasi manusia. Melalui advokasi dan pendidikan politik, gereja berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu kritis, serta mempromosikan partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Tantangan yang Dihadapi: Di sisi lain, keterlibatan gereja dalam politik tidak tanpa tantangan. Polarisasi politik, tekanan dari berbagai kelompok, serta konflik internal dapat mengancam integritas gereja dan memecah belah komunitas. Selain itu, ada risiko bahwa keterlibatan politik dapat mengurangi kredibilitas gereja sebagai lembaga spiritual. Keseimbangan yang Diperlukan: Untuk mencapai tujuan sosial dan spiritual, gereja perlu menavigasi keterlibatan politik dengan hati-hati, menjaga keseimbangan antara advokasi dan misi religiusnya. Keterlibatan yang didasarkan pada nilai-nilai moral yang kuat dapat memperkuat pengaruh gereja dalam masyarakat tanpa kehilangan identitasnya. Kerjasama dengan Negara: Dalam konteks hubungan antara gereja dan

negara, kerjasama yang konstruktif diperlukan untuk menangani isu-isu sosial yang lebih besar. Gereja dapat berperan sebagai mitra dalam pembangunan sosial, sementara negara perlu menjamin kebebasan beragama dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Jadi, Secara keseluruhan, keterlibatan gereja dalam politik di Indonesia memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat, asalkan dilakukan dengan prinsip-prinsip etika yang jelas dan mempertimbangkan konteks sosial yang ada. Kesejahteraan bersama dan harmoni sosial menjadi tujuan akhir yang dapat dicapai melalui kolaborasi yang baik antara gereja, negara, dan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Dedy, "Analisis Pemikiran Filsafat Thomas Aquinos" dalam <https://www.ejournal.unigal.ac.id> (diakses, 8 Maret, 2024).
- Andreas A. Yewangoe, Agama dan Negara: Sebuah Hubungan Yang Tidak mudah, Disampaikan Dalam Kursus "Pendidikan Politik Angkatan III" di Palangka Raya, 20 Oktober 2008.
- J. Soedjati Dwiwondo. Gereja dan Politik: dari orde baru hingga reformasi. (Yogyakarta: Kanisius, 2023)
- Jesse Miranda, Gereja Kristen dan Pelayanan (Malang: Gandum Mas, 1986).
- J.S. Aritonang, Berbagai Aliran di Dalam dan di Sekitar Gereja, (Jakarta: BPK Gunung Mulia: 20007).
- Kec. Baguala. Kota Ambon and Provinsi Maluku "KENOSIS: JURNAL KAJIAN THEOLOGIA" ISSN 2460-6901 No 1: 170-122.
- Paul Enns, The Moody Handbook Of Theology (Malang: Literatur SAAT, 2006).
- Robert P. Borong, Etika Politik Kristen serba-serbi Politik Praktis (Jakarta: Unit Publikasi dan Informasi dan Pusat Studi Etika), 5.
- Syamsuddin Haris, Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru (Jakarta, Yayasan Obor, 1999)
- Sularso Sopater, Kepemimpinan dan Pembinaan Warga Gereja (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998).
- Weinata Sairin dan J.M. Pattiasina, Hubungan Gereja dan Negara dan Hak-Hak Asasi Manusia, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996).
- Yakub B. Susabda, Prinsip-prinsip Pertimbangan Utama dalam Administrasi Gereja (Malang: Gandum Mas, 2006).
- Zakaria J. Ngelow, Pengalaman Kristen dalam hubungan agama dan Negara, Pointers pada seminar Gereja, Negara dan Isu-Isu Agama, download, 15 Juli 2024.